

**Efektivitas Toko Milik Rakyat (TOMIRA) dalam Mewujudkan Pemberdayaan
Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018**

Rosi Indri Isyaroh¹, Muhammad Eko Atmojo²

²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Email: rosindrishyaroh@gmail.com; atmojoeko91@gmail.com;

Abstrak

Maraknya toko modern atau toko berjejaring menimbulkan permasalahan di masyarakat Kulon Progo. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, Pemda Kulon Progo mengeluarkan kebijakan berupa Perda. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Hal yang istimewa dari Perda ini yaitu adanya sistem zonasi dimana jarak antara toko modern atau berjejaring dengan pasar tradisional harus berjarak 1000 meter. Ketidak sesuaian peraturan yang sudah diperbuat dengan kenyataan mendapat respon dari Pemda Kulon Progo dengan memberikan pilihan antara lain seperti tidak memperpanjang ijin, ditutup atau *take over* kepada pengelola minimarket tersebut. *Take Over* disini diartikan sebagai pengambil alihan lahan sehingga pemerintah tidak bersusah payah untuk merintis atau membuka kembali toko tersebut dengan nama TOMIRA (Toko Milik Rakyat). Bupati Kulon Progo sering menggencarkan gerakan “Bela Beli Kulon Progo” dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah Kulon Progo. Dalam penggerakan program Tomira ini dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan memberikan pelatihan terhadap koperasi dan UMKM. Produk UMKM yang harus masuk ke dalam Tomira minimal 20% dari seluruh barang di dalam toko tersebut.

Kata kunci: Efektivitas Tomira, Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi, UMKM

**The effectiveness of Toko Milik Rakyat (TOMIRA) In Creating Community
Empowerment In the Kulon Progo Regency 2018 years**

Abstract

The rise of modern shops or network shops has caused problems in the Kulon Progo community. To solve the existing problems, the Regional Government of Kulon Progo issued a policy in the form of a Regional Regulation. Regional Regulation Number 11 of 2011 concerning Protection and Empowerment of Traditional Markets and the Arrangement of Modern Shopping Centers and Stores. The special thing about this regulation is that there is a zoning system where the distance between modern shops or networking with traditional markets must be 1000 meters. Discrepancy in regulations that have been made with the reality gets a response from the Kulon Progo Regional Government by giving options such as not extending permits, being closed or taking over to the manager of the minimarket. Take Over here is defined as land acquisition so that the government does not bother to start or reopen the store under the name TOMIRA (Toko Milik Rakyat). The Kulon Progo Regent often intensified the "Bela Beli Kulon Progo" movement by utilizing the local potential of the Kulon Progo area. In grasping the Tomira program, it is assisted by the Office of Cooperatives and UMKM by providing training to cooperatives and UMKM. UMKM products that must be entered into Tomira at least 20% of all items in the store.

Kata Kunci : *Tomira Effectiveness, Community Empowerment, Cooperatives, UMKM*

Latar Belakang

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang mempunyai potensi sangat tinggi, terutama dibidang pemberdayaan masyarakat, mengingat Kabupaten Kulon Progo mempunyai banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan melalui skema pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Akan tetapi berdasarkan pernyataan (Rijanta, 2013) dalam (Susilo & Rijanta, 2017) bahwa Kabupaten Kulon Progo salah satu Kabupaten yang mengalami kebocoran. Kebocoran yang di maksud adalah Pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Dengan adanya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo dan kebocoran tersebut seharusnya pemerintah bisa melakukan sesuatu yang bisa berpihak kepada masyarakat. Mengingat Kabupaten Kulon Progo juga merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi di bandingkan dengan Kabupaten lain di DIY.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persen (%)
2014	265,575	84,67	20,64
2015	273,436	88,13	21,4
2016	297,353	84,34	20,3
2017	312,403	84,17	20,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo dari Tahun 2014-2017

Dengan adanya persentase jumlah kemiskinan yang ada maka harus ada tindakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo. Dimana potensi-potensi tersebut bisa dikelola oleh masyarakat dan dipasarkan melalui UMKM. Mengingat Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten yang mendukung pemasaran produk UMKM untuk bersaing di kancah nasional, salah satunya adalah dengan memfasilitasi melalui kerjasama antara pemerintah dengan berbagai perusahaan nasional. Bentuk kerjasama ini sangat menguntungkan sekali bagi masyarakat maupun pemerintah terutama dalam hal memperkenalkan produk lokal ke tingkat nasional.

Pengenalan produk lokal ke tingkat nasional ini di bingkai dalam gerakan bela-beli Kulon Progo. Dimana dengan adanya gerakan bela-beli Kulon Progo ini akan sangat membantu pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Mengingat masih banyak sekali masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang kesejahteraannya masih kurang dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kurniawan, 2015). Salah satu bentuk dari gerakan bela-beli Kulon Progo adalah adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan toko modern yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Mengingat kebijakan “*Bela-Beli Kulon Progo*” merupakan suatu kebijakan yang mengajak masyarakat untuk membangun perekonomian dengan melalui mencintai produk lokal. Selain itu juga kebijakan ini bisa menciptakan produk-produk lokal melalui pemberdayaan masyarakat yang dibingkai melalui UMKM.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* Chamber (1995) (dalam Noor, 2011). Dengan adanya konsep pemberdayaan masyarakat ini akan sangat membantu dalam hal peningkatan perekonomian. Mengingat bahwa Pengembangan wilayah berbasis ekonomi lokal menjadi salah satu arahan pengembangan yang penting bagi suatu daerah (Karina, K., & Kurniawan, 2019). Salah satu bentuk dari pengembangan ekonomi lokal adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat, karena hal ini bisa mengangkat kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan.

Konsep pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat dan Perbelanjaan Toko Modern. Kebijakan ini muncul juga dikarenakan maraknya toko modern yang mulai berkembang di daerah Kabupaten Kulon Progo. Berkemangnya toko modern tersebut akan membuat keresahan bagi masyarakat terutama bagi pasar tradisional maupun toko-toko kecil yang dikelola oleh masyarakat secara langsung. Maka dari itu sangat diperlukan ketegasan dari pemerintah dalam hal perlindungan perekonomian masyarakat serta pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari (Harto & Sujito, 2017) bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan kebijakan pro-rakyat yang mendapatkan respon positif dari koperasi dan pelaku UMKM di Kabupaten Kulon Progo.

Dengan perda tersebut maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan toko modern yang ada salah satunya *alfamart* dan *indomart*. Dimana dalam poin kerjasama tersebut salah satu poin yang diangkat adalah merubah namanya menjadi toko modern menjadi toko milik rakyat (TOMIRA). Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk jawaban dari keresahan pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Selain itu kebijakan ini juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Selain itu TOMIRA juga sebagai strategi dalam pengembangan ekonomi lokal yang sangat efektif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah atau lokal (Karina & Kurniawan, 2019).

Dengan adanya kebijakan ini maka perlu tindakan yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok UMKM (Kurniawati, Supriyono, & Hanafi, 2013). Tujuan dari pemberian pelatihan adalah untuk meningkatkan kualitas produk maupun kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan UMKM. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal pemberian perlindungan kepada UMKM di daerah. Untuk menciptakan produk yang berkualitas dan mempunyai daya saing di pasar maka tidak cukup dengan pelatihan saja melainkan harus ada dukungan lain dari pemerintah baik dukungan infrastruktur maupun non infrastruktur, seperti promosi, pelatihan dan lain sebagainya. Berdasarkan pernyataan dari (Pratiwi, 2016) bahwa kebijakan promosi sangatlah penting terutama dalam hal pelatihan sumber daya manusia, permodalan, peralatan maupun pemasaran, hal ini dilakukan guna mendukung kualitas produk UMKM dalam kancah nasional atau pemasaran produk UMKM.

Tomira yang dijalankan di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan toko modern. Adapun perbedaan tomira dengan toko modern lainnya ialah dengan adanya produk-produk lokal yang dikemas melalui UMKM Kabupaten Kulon Progo masuk ke dalam toko modern tersebut. Produk lokal tersebut merupakan hasil pemberdayaan masyarakat yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa bersaing dengan produk nasional. Mengingat dalam pelaksanaan kerjasama tersebut disepakati bahwa harus ada produk-produk lokal UMKM Kabupaten Kulon Progo minimal 20% dari barang toko (www.menpan.go.id). Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk untuk melindungi ekonomi kerakyatan, mengingat toko modern juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap toko dan pasar tradisional. Hal ini

sesuai dengan pernyataan dari (Iffah, Sutikno, & Sari, 2011) bahwa semakin besar jangkauan toko modern/minimarket maka akan akan banyak toko yang terfriksi, selain itu satu minimarket/toko modern akan berdampak pada 4 toko usaha kecil, dengan rata-rata friksi sebesar 57.29%.

Selain itu Perda Nomor 11 tahun 2011 ini juga memiliki keunikan dimana terdapat dalam pasal 14 huruf c. Poin penting dalam Perda ini adalah dengan adanya system zonasi. Jarak yang diperbolehkan toko modern dengan pasar tradisional adalah berjarak 1000 meter atau sama dengan 1 KM, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak toko modern yang melanggar. Dimana sejak berlakunya perda tersebut Kabupaten Kulon Progo telah mengelola 16 Tomira, yang dimulai pada tahun 2014 sampai dengan 2018, selain itu produk lokal yang bisa dikelola dan masuk ke dalam Tomira juga mengalami peningkatan yang semula hanya 20 item saat ini sudah bisa menjadi 110 item (www.koperasi.kulonprogokab.go.id). Selain adanya peningkatan jumlah volume produk lokal yang masuk juga adanya peningkatan pendapatan, sehingga kebijakan ini sangat bagus sekali untuk diterapkan dan menjadi salah satu alternative dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa peran UMKM sangatlah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu banyak muncul kelompok-kelompok kecil yang membuat produk olahan sehingga memiliki semangat untuk berkemajuan. Untuk lebih memaksimalkan penjualannya UMKM yang berada di Kulon Progo bekerjasama dengan Koperasi kemudian dituangkan dalam keefektivitasan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kulon Progo. Dengan berkembangnya TOMIRA akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik anggota UMKM, Koperasi maupun masyarakat Kulon Progo.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengertian dari pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Dinas Koperasi dan UMKM, yang mana dalam penelitian ini akan difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat yang dikelola UMKM dan bekerjasama dengan Tomira. Adapun narasumber yang ada dalam penelitian ini adalah

Dinas Koperasi dan UMKM, Pengelola Tomira dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok koperasi di bawah UMKM Kabupaten Kulon Progo. Selain itu metode pencarian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, serta metode teknik pengolahan data menggunakan Nvivo 12 Plus.

Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membuat masyarakat lebih mandiri guna membangun kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup maupun menuju hidup yang lebih sejahtera. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kulon Progo membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, serta dukungan pemerintah dalam memfasilitasi UMKM dengan toko modern. Berdasarkan pernyataan dari Nurohmi (2015) (dalam Karina & Kurniawan, 2019) bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang sangat positif. Oleh karena itu, Kabupaten Kulon Progo mempunyai inisiatif untuk memfasilitasi UMKM dengan cara kerjasama dengan toko modern yang kemudian nama tersebut berganti dan menjadi toko milik rakyat (TOMIRA). Tomira sendiri merupakan Toko Milik Rakyat dimana Tomira ini dikelola oleh Koperasi yang bekerjasama dengan toko modern atau berjejaring yang berada di Kabupaten Kulon Progo.

Awal mula berdirinya Tomira ini yaitu untuk melindungi pasar tradisional yang berada di Kulon Progo karena toko berjejaring yang semakin banyak sehingga membuat keresahan bagi masyarakat. Selain untuk melindungi pasar tradisional tujuan berdirinya Tomira yaitu untuk memberdayakan masyarakat supaya hidup lebih mandiri. Dengan kemunculan Tomira ini membuat UMKM yang ada di Kulon Progo lebih semangat untuk mengembangkan ide-ide baru dan memasarkan produknya ke Tomira. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting bagi daerah. Hal ini juga diungkapkan oleh (Kurniawati et al., 2013) bahwa kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menghasilkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tomira memang sepenuhnya milik Koperasi, tetapi Tomira juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Industri, beserta UMKM yang ada di Kulon Progo. Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab

dan mengemban tugas pelaksanaan serta menjamin kualitas tiap Koperasi dan UMKM yang berada di Kulon Progo. Selain itu Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pelatihan seperti pengemasan, perizinan, pembuatan proposal, binaan menggunakan system online, dll. Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo juga memberikan pelatihan seperti harga intelektual, penataan barang dagangan, dan motivasi usaha. Dengan bantuan kedua belah pihak Dinas tersebut Tomira berjalan dengan baik dan mampu menampung produk-produk lokal yang berkualitas. Berikut cara untuk mengukur efektivitas Tomira dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Kulon Progo.

Keberhasilan Program

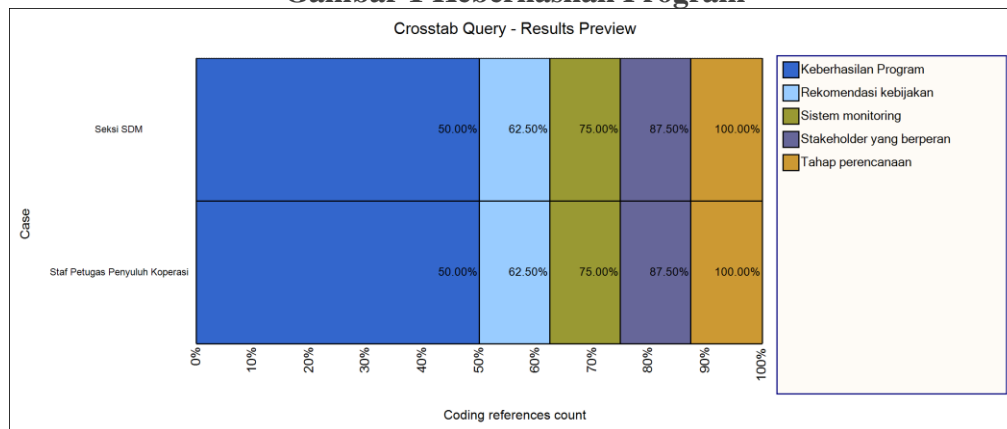
Untuk mengetahui keberhasilan program Tomira ini menggunakan beberapa indikator. Adapun indikator yang digunakan adalah tahap perencanaan, stakeholder yang berperan, rekomendasi kebijakan, dan system monitoring. Program Tomira yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Kulon Progo. Tomira sendiri bermula dari keresahan warga yang merasakan semakin lama toko modern semakin banyak dan usaha mereka menjadi tidak terlihat dan kalah saing. Kemudian dari sini Bupati Kulon Progo mengeluarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Toko Modern.

Perda Nomor 11 tahun 2011 memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM. Akan tetapi kemunculan Perda ini juga mendapat penolakan dari toko modern dengan beralasan nanti banyak pegawai yang akan di PHK. Kemudian pemerintah memberikan 3 pilihan untuk toko modern yaitu tidak memperpanjang ijin, *take over*, dan ditutup. Dari sini toko modern banyak yang memilih *take over* dimana mereka bekerjasama dengan koperasi yang nantinya akan berubah nama menjadi Tomira. Hal yang menjadi paling menarik dari kebijakan ini adalah terdapat system zonasi dimana toko modern harus berjarak minimal 1000 meter dengan pasar tradisional. Hal ini dilakukan guna melindungi pasar atau toko tradisional serta menepis keresahan masyarakat mengenai maraknya toko modern yang ada di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mewujudkan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah perlu adanya kerjasama yang baik antara OPD terkait maupun stakeholder terkait. OPD yang berperan disini mulai dari pemerintah, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan dibantu oleh Dinas lainnya bahkan sampai masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik tersebut akan sangat

membantu dalam implementasi peraturan maupun kebijakan yang sudah diambil dan disepakati antar kedua belah pihak. Selain itu juga perlunya sistem monitoring untuk melihat progress maupun mengevaluasi keberlanjutan dari kebijakan tersebut. Contohnya yaitu mengenai penambahan tomira pada setiap tahunnya, dan pada tahun 2020 ini akan tomira akan bertambah 4, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa dikembangkan secara maksimal. Selain itu dengan adanya system monitoring dan penilaian berkala yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM akan terhadap UMKM dan Koprasi yang ada di Kulon Progo akan menjadi salah satu poin penting. Karena dengan adanya monitoring tersebut UMKM dan Koprasi bisa menilai produk-produk lokalnya, sehingga bisa untuk dijadikan sebagai acuan dalam perbaikan diri. Berdasarkan olahan dengan menggunakan Nvivo 12 Plus maka dapat dilihat gambarnya sebgai berikut.

Gambar 1 Keberhasilan Program



Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Analisis Fitur Crosstab Query by Nvivo 12 Tahun 2020

Melalui hasil analisis dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 plus, dengan menggunakan indikator Tahap Perencanaan, Stakeholder yang berperan, Rekomendasi Kebijakan, serta Sistem monitoring dapat dilihat dengan jelas bahwa keberhasilan program TOMIRA cukup bagus dan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari gambar di atas dimana dengan menggunakan dua narasumber yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo untuk keberhasilan program sendiri mencapai 50%. Kemudian untuk indikator pada tahap perencanaan mendapat nilai sempurna yaitu 100%. Selanjutnya untuk stakeholder yang terkait mencapai 87.50%. Tahap selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan mencapai 62.50%, dan diakhiri dengan sistem monitoring mendapatkan 75%. Jadi dari keseluruhan indikator yang menghitung dalam keberhasilan program TOMIRA ini sudah berjalan dengan baik.

Keberhasilan Sasaran

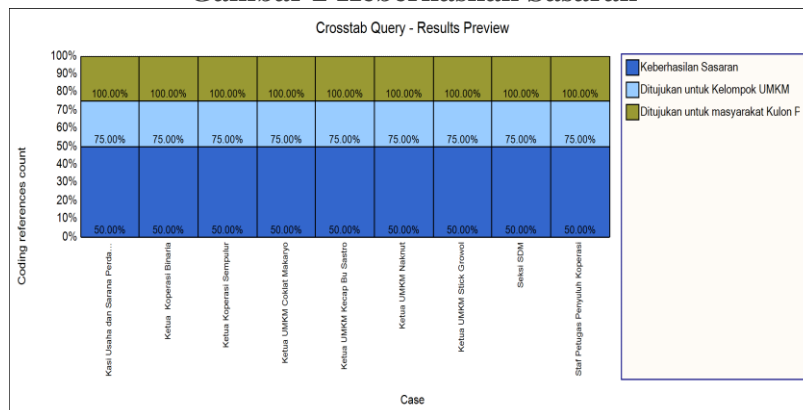
Dari setiap program pasti ada keinginan atau sasaran yang ingin dicapai. Dapat dikatakan berhasil apabila program tersebut berjalan dan selesai dengan baik sesuai yang direncanakan pada awalnya. Sehingga perlu adanya target atau sasaran yang dituju. Mekanisme yang digunakan dalam tahapan keberhasilan sasaran menggunakan indikator untuk masyarakat Kulon Progo dan kelompok UMKM.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Kulon Progo mengatakan bahwasannya program Tomira sendiri merupakan kebijakan Bapak Hasto yang ingin melindungi pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo dan lebih menonjolkan produk lokal. Selain itu program Tomira merupakan program yang dapat memberdayakan masyarakatnya melalui UMKM yang ada di Kulon Progo. Selain itu kebijakan ini juga menjadi salah satu poin penting dalam membantu suksesnya pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kewilayahan dan lingkungan serta berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dibuktikan dengan berkembangnya Tomira yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, dimana setiap tahunnya toko modern yang di *take over* oleh pemerintah semakin meningkat. Dengan begitu maka program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, serta produk UMKM Kabupaten Kulon Progo bisa bersaing di tingkat nasional (Susilo & Rijanta, 2017).

Tomira berdiri sejak tahun 2014 yang pada awalnya hanya terdiri dari 3 Tomira. Kemudian di tahun 2017 bertambah menjadi 7 Tomira. Pada tahun 2018 bertambah lagi menjadi 10 Tomira. Dan pada tahun 2019 bertambah lagi menjadi 19 Tomira. Dari sini Tomira bisa dijadikan sebagai peluang kerjasama antara koperasi, toko modern, dan UMKM. Tomira bisa dijadikan alat atau tempat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kulon Progo. Dengan adanya UMKM ini masyarakat bisa lebih mandiri serta tingkat pengangguran di Kabupaten Kulon Progo berkurang. Pada pelaksanaan kebijakan program Tomira ini ada hal yang paling penting untuk diketahui, salah satu hal tersebut adalah mengenai proses pemberdayaan masyarakat melalui UMKM. Keberhasilan Kulon Progo dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat belum sebanding dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Secara tidak langsung memang mempunyai dampak dalam hal penurunan kemiskinan akan tetapi hanya sebageian kecil, sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo masih relative tinggi.

Tomira juga sangat efektif dalam mengangkat produk lokal untuk bersaing ditingkat nasional, akan tetapi produk-produk UMKM belum semuanya bisa masuk kedalam toko modern. Maka dari itu dari Dinas Koperasi mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas produk-produk UMKM di Kabupaten Kulon Progo. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan kualitas produk lokal UMKM sehingga bisa bersaing dengan produk-produk pabrik di tingkat nasional. Selain itu bagi kelompok UMKM dan Koperasi berlomba-lomba untuk mengeluarkan ide baru dan memproduksi olahan baru lebih banyak. Dengan banyaknya produk yang masuk ke dalam Tomira akan semakin baik bagi program Tomira untuk mencapai sasaran. Sasaran yang ingin dicapai yaitu minimal 20% dari produk pabrik. Akan tetapi untuk saat ini semua Tomira belum mencapai 20% tersebut dan masih berusaha untuk menuju 20%. Berikut hasil dari keberhasilan sasaran yang diolah menggunakan Nvivo 12 Plus dan menghasilkan gambar sebagai berikut.

Gambar 2 Keberhasilan Sasaran



Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Analisis Crosstab Query by Nvivo 12 Tahun 2020

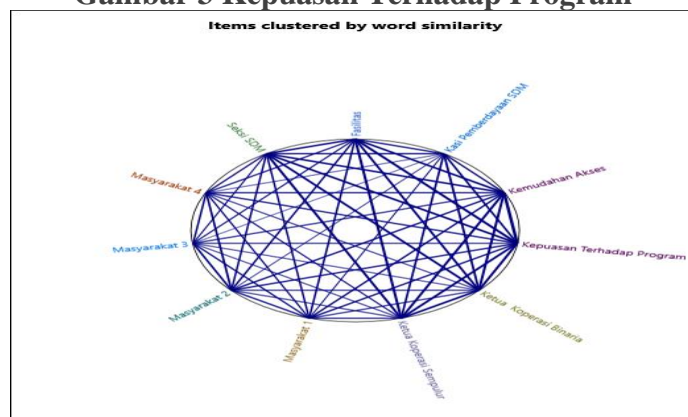
Dalam gambar perhitungan keberhasilan sasaran dengan menggunakan *Crosstab Query* dapat terlihat bahwa dalam keberhasilan sasaran untuk menghitung efektivitas Tomira dengan bantuan dua indikator dapat dikatakan memiliki nilai baik. Dalam keberhasilan sasaran disini menggunakan dua indikator, yang *pertama* untuk kelompok UMKM dan *kedua* untuk masyarakat. Narasumber yang digunakan dalam variable ini sebanyak 8 (delapan) narasumber yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Ketua Koperasi, dan Kelompok UMKM. Dalam tabel tersebut masing-masing keberhasilan sasaran mendapatkan nilai 50%, untuk kelompok UMKM mencapai 75%, dan yang terakhir untuk masyarakat mencapai 100%. Berarti dapat dikatakan masyarakat sudah menikmati hasil dari program TOMIRA ini.

Kepuasan Terhadap Program

Secara keseluruhan kepuasan terhadap program ini sangat dirasakan baik dari masyarakat, koperasi, maupun OPD yang terkait lainnya. Kepuasan program disini memiliki dua indikator yaitu kemudahan akses dan fasilitas. Dalam kemudahan akses yang dirasakan oleh pihak koperasi yaitu dalam hal perizinan. Untuk menjalin kemitraan antara koperasi dengan toko modern, koperasi dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo. Sebelum menandatangani MoU bersama toko modern koperasi terlebih dahulu memberikan proposal kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo. Baru kemudian dari Dinas menyeleksi siapa saja yang akan bermitra dengan toko modern.

Keuntungan yang dirasakan bagi masyarakat Kulon Progo sendiri yaitu mereka dapat dengan mudah menemukan Tomira dan memenuhi kebutuhannya. Selain itu keunggulan Tomira yaitu menyediakan produk lokal dan buka selama 24 jam. Hal inilah yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya apabila membutuhkan pada saat yang mendesak atau mendadak. Kemudian untuk hal fasilitas yang dirasakan oleh pihak koperasi yaitu mereka mendapatkan pelatihan seperti pembuatan proposal, laporan akhir, dan mengelola usaha dengan baik dan benar. Selain itu dalam hal fasilitas masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik seperti adanya cepat tanggap dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dalam keunggulannya Tomira memiliki satu kekurangan yaitu dalam system pembayarannya masih menggunakan system manual dan tidak terdapat nota atau bukti pembayaran. Berikut hasil dari kepuasan terhadap program dalam menghitung efektivitas Tomira dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kulon Progo yang diolah menggunakan Nvivo 12 Plus.

Gambar 3 Kepuasan Terhadap Program



Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Analisis Cluster Analisis by Nvivo 12 Tahun 2020

Pengolahan kepuasan terhadap program terdapat indikator yang mempengaruhi. Keberhasilan terhadap program memiliki dua indikator *pertama*, fasilitas yang berkaitan dengan pelatihan bagi UMKM dan yang diterima dari masyarakat seperti pelayanan yang diberikan pegawai TOMIRA. *Kedua*, kemudahan akses dimana berkaitan dengan perizinan dan keterlibatan masyarakat dalam program TOMIRA ini. Selain itu ada juga narasumber yang berhubungan dengan kepuasan terhadap program ini seperti, Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo, Koperasi, UMKM, dan Masyarakat. Dari hasil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator saling terkait dan terhubung satu sama lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya korelasi yang sangat tinggi dimana dibuktikan dengan garis biru paling tebal. Jadi untuk kepuasan terhadap program semua saling berkorelasi.

Tingkat Input dan Output

Tingkat input dan output dalam suatu program berkaitan dengan produktivitas. Semakin banyaknya *output* atau pengeluaran yang di hasilkan maka akan semakin baik untuk menuju suatu tujuan program. Tingkat *input* dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yaitu jumlah dana dan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian untuk tingkat *output* dipengaruhi oleh perencanaan dan hasil akhir suatu program.

Di dalam hal penganggaran program Tomira ini tidak mendapatkan bantuan atau APBD karena Tomira merupakan sebuah inovasi atau kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Kulon Progo sendiri. Kebijakan atau inovasi ini mendapatkan peringkat ke 99 dari seluruh Indonesia. Hal ini juga dapat dijadikan anutan atau di replikasi di daerah lain. Jadi untuk penganggaran peluasan dan pengembangan Tomira ini berasal dari uang khas yang ada di masing-masing Koperasi yang bertanggungjawab atas Tomira. Selain itu dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai menjadi kewenangan toko modern, bukan menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Hal ini juga berlaku untuk asset seperti gedung, pembayaran pajak, gaji pegawai, dan perekrutan pegawai ini dilakukan oleh toko modern. Sedangkan dari pihak koperasi hanya bertanggungjawab atas suplay produk-produk lokal Kabupaten Kulon Progo yang diambilkan dari kelompok UMKM di Kulon Progo.

Tingkat *output* yang dihasilkan dari program Tomira ini dimulai dari perencanaan sampai tahap akhir. Untuk perencanaan program Tomira sudah berjalan dengan baik dan dapat

memberdayakan masyarakat Kulon Progo. Akan tetapi yang masih menjadi kendala yaitu produk lokal belum mencapai 20% sesuai kebijakan awal. Hal ini dikarenakan ada seleksi yang sangat ketat dari Pemerintah sehingga produk-produk yang masuk ke toko modern atau Tomira merupakan produk yang berkualitas dan siap bersaing dengan produk pabrikan. Selain itu hasil evaluasi program Tomira yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM tiap tahunnya bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan program yang berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana penambahan Tomira pada tahun 2020. Berikut daftar yang rencananya akan dibuat sebagai Tomira baru di Kulon Progo:

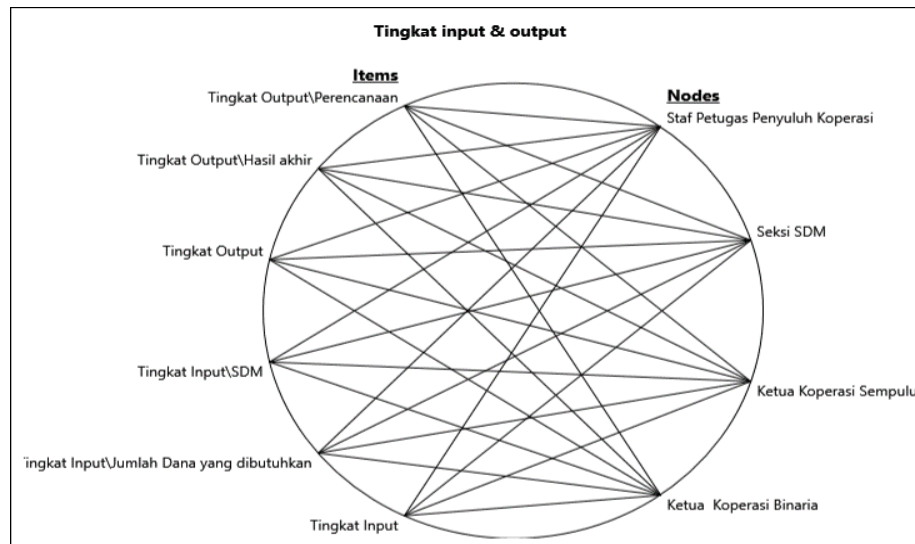
Tabel 2. Rencana Tomira Baru di Kulon Progo

<i>Tempat TOMIRA</i>	<i>Koperasi yang Bertanggungjawab</i>
<i>Kecamatan Pengasih</i>	KSU Martekas
<i>Giri Peni Wates</i>	KUD Bangun Bendungan
<i>Bridjen Katamso</i>	Koppas Niaga Binangun
<i>Pom bensin Sogan (Karangwuri Wates)</i>	KSU Nelayan Permadani

Sumber: diolah oleh peneliti dari hasil wawancara 2020

Pada intinya tingkat *input* dan *output* dari program Tomira ini sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi di dalam penjalanan program Tomira ini untuk pengembangan Tomira sendiri berasal dari khas Koperasi dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun Dinas. Dari Dinas hanya menyediakan bentuk pelatihan untuk membekali Koperasi dan kelompok UMKM. Untuk pengeluaran atau *output* dari program Tomira ini sudah cukup berhasil, hanya saja di dalam pemenuhan produk lokal belum mencapai 20% sesuai dengan kebijakan awal. Berikut hasil perhitungan tingkat input dan output dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus.

Gambar 4 Tingkat Input Dan Output



Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Analisis Group Query Criteria by Nvivo 12 Tahun 2020

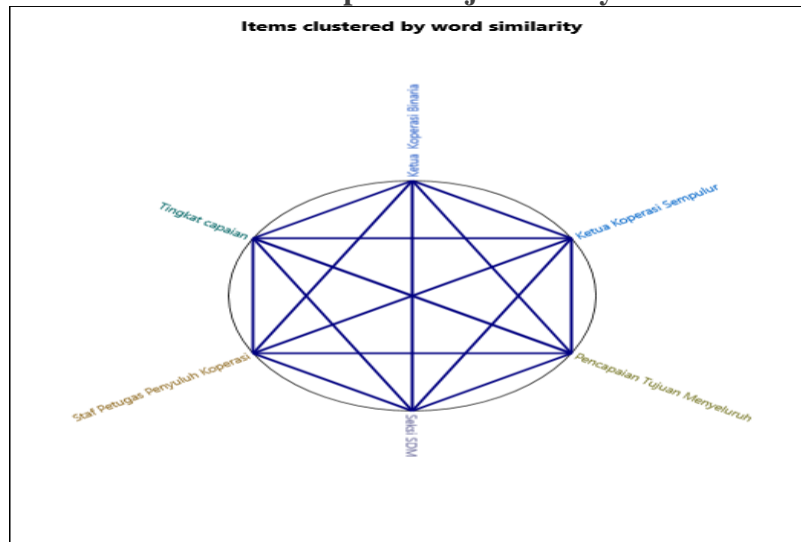
Dari gambar di atas data diolah menggunakan *Group Query Criteria* dimana tingkat input dan output menggunakan dua narasumber yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo beserta Koperasi yang bekerjasama dengan toko berjejaring. Dari gambar tersebut variabel tingkat input dan output dipengaruhi oleh beberapa indikator. Variabel tingkat input dipengaruhi oleh indikator seperti jumlah dana yang dibutuhkan (untuk pengembangan atau peluasan TOMIRA) dan SDM, kemudian untuk tingkat output indikator yang mempengaruhi seperti perencanaan hingga hasil akhir. Dari semua indikator tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Dalam suatu program pasti ada keinginan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana awal. Untuk itu di dalam kasus pemberdayaan masyarakat Kulon Progo melalui program Tomira ini ada pencapaian tujuan menyeluruh. Dari pencapaian tujuan menyeluruh ini berawal suatu perencanaan, pengarahannya, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Kemudian indikator yang digunakan adalah tingkat capaian. Pada kenyataannya program Tomira ini sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi yang masih menjadi kendala di dalam program Tomira ini adalah pemenuhan produk lokal yang berasal dari kelompok UMKM yang ada di dalam Tomira belum mencapai target minimal 20%. Untuk itu dari beberapa OPD seperti Dinas Koperasi dan UMKM dan Koperasi memberikan dukungan penuh kepada kelompok UMKM untuk

bisa menemukan ide-ide baru agar produk yang ada di dalam Tomira bisa mencapai target 20%. Berikut hasil Nvivo 12 Plus dari pencapaian tujuan menyeluruh dalam menghitung efektivitas Tomira dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Kulon Progo.

Gambar 5 Pencapaian Tujuan Menyeluruh



Sumber: Diolah Penulis dari Hasil Analisis Cluster Analysis by Nvivo 12 Tahun 2020

Gambar di atas diolah menggunakan cluster analysis dengan aplikasi Nvivo12 plus. Dari gambar di atas merupakan hasil data dari variabel pencapaian tujuan menyeluruh dengan indikator tingkat capaian program. gambar tersebut membuktikan bahwa tingkat capaian yang ada pada program TOMIRA ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan gambar di atas semua garis saling berkaitan dengan indikator dan narasumber. Narasumber yang berpengaruh dalam variabel ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dan Koperasi.

Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat melalui program Tomira yang di gagas oleh Bupati di Kulon Progo ini cukup berhasil. Program Tomira ini berasal dari konsep kebijakan Bela-Beli Kulon Progo dimana digunakan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakatnya melalui kelompok UMKM. Selain itu Bapak Bupati Kulon Progo ingin melindungi pasar tradisional dan menonjolkan produk lokal yang dibuat oleh kelompok UMKM dan menginginkan masyarakatnya untuk mencintai atau membeli produk masyarakatnya sendiri.

Faktor pendukung di dalam pengembangan masyarakat melalui program Tomira ini di bantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kedua Dinas tersebut memberikan pelatihan dan dukungan terhadap koperasi dan kelompok UMKM yang ada di Kulon Progo. Dengan memberikan pelatihan ini akhirnya produksi olahan kelompok UMKM bisa sampai ke pasar DIY, toko modern lainnya, bahkan sampai ke pasar nasional. Akan tetapi yang masih menjadi kendala di dalam program Tomira ini adalah produk UMKM yang berada di Tomira belum mencapai 20% sesuai dengan kebijakan awal.

Daftar Pustaka

- Bengkulu Utara belajar tentang Tomira ke Kulon Progo. (2018). Retrieved from <https://koperasi.kulonprogokab.go.id/article-391-bengkulu-utara-belajar-tentang-tomira-ke-kulon-progo.html>
- Harto, R. A. W., & Sujito, A. (2017). *Makna Sosial Toko Milik Rakyat (TOMIRA) Studi di Kabupaten Kulon Progo*. Retrieved from http://etd.repository.uwgm.ac.id/home/detail_pencarian/116439
- Iffah, M., Sutikno, F. R., & Sari, N. (2011). Pengaruh Toko Modern terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan (Studi Kasus : Minimarket Kecamatan Blimbing , Kota Malang). *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 3(1), 55–64.
- Karina, K., & Kurniawan, K. (2019). Analisis Keterkaitan Distribusi Spasial Tomira dengan Komoditas Unggulan Daerah Andri Kurniawan Abstract Development based on local economy is one of the important development concept for some regions . Kulon Progo has a local economic development policy. *Bumi Indonesia*, 7.
- Karina, & Kurniawan, A. (2019). Analisis Keterkaitan Distribusi Spasial Tomira dengan Komoditas Unggulan Daerah. *Jurnal Bumi Indonesia*, 8(3).
- Kurniawan, B. (2015). “Bela Beli Kulonprogo”, Spirit dan Sukses Bupati Hasto Angkat Produk Lokal. Retrieved from detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-3102031/bela-beli-kulonprogo-spirit-dan-sukses-bupati-hasto-angkat-produk-lokal>
- Kurniawati, D. P., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 9–14.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2).
- Pratiwi, L. (2016). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm Kabupaten Kulon Progo* (Universitas Gadjah Mada). Retrieved from http://etd.repository.uwgm.ac.id/home/detail_pencarian/96929
- Susilo, E. G. B., & Rijanta. (2017). Kajian Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” (Kasus: Air-KU, Batik Geblek Renteng, dan ToMiRa. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(3).
- ToMiRa, Model Pemberdayaan UMKM dari Kulon Progo. (2017). Retrieved from Humas MenpanRB website: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tomira-model-pemberdayaan-umkm-dari-kulon-progo>